

| RESEARCH ARTICLE

Model Kolaboratif Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta dalam Mengintegrasikan Tujuan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Daerah

Arif Rahman Hakim^{1*}, Genius Umar¹

¹Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

***Corresponding Author:** arif.rahman.unp@gmail.com

| ABSTRACT

This study examines the collaborative model between government, community, and private sector in integrating the Development Goals (SDGs) into regional development plans. This collaboration is to ensure that development at the regional level can run and is in line with the achievement of SDGs. This study identifies the challenges and obstacles faced by each party in the collaboration process, as well as the factors that support the success of the collaboration. The results of the study indicate that commitment, transparency, and active community participation are key factors influencing the success of collaboration. In addition, information and communication technology also plays a role in facilitating effective collaboration. Based on these findings, it is recommended that government policies be more supportive of the private sector, increase community participation, and utilize technology to improve the efficiency and effectiveness of collaboration in achieving SDGs at the regional level.

| KEYWORDS

Collaboration; SDGs; Regional Development.

PENDAHULUAN

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam rencana pembangunan daerah menjadi krusial untuk menjawab tantangan pembangunan yang kompleks dan multidimensional. SDGs mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait dan tidak dapat dicapai secara sektoral. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang mengabaikan prinsip SDGs berisiko menciptakan ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Dengan menjadikan SDGs sebagai acuan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen global yang telah disepakati oleh Indonesia (Rahmat & Alawiyah, 2020; Putri et al., 2020; Ardinata et al., 2022; Rahmat et al., 2021; Marufah et al., 2020; Bastian et al., 2021; Alawiyah et al., 2020; Rahmat, 2019; Syarifah et al., 2020).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjabarkan dan mengimplementasikan tujuan SDGs sesuai dengan konteks lokal. Sebagai penggerak utama pembangunan di tingkat akar rumput, pemerintah daerah bertanggung jawab merumuskan rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Dalam kerangka desentralisasi, daerah memiliki keleluasaan untuk merancang kebijakan yang adaptif terhadap isu-isu lokal. Namun, agar implementasi SDGs efektif, diperlukan koordinasi lintas sektor dan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan seluruh aktor pembangunan di wilayah tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil (Muara et al., 2021; Rahmat et al., 2021; Pratikno et al., 2020; Priambodo et al., 2020; Rahmanisa et al., 2021; Rahmat & Budiarto, 2021; Zakiah et al., 2022; Hakim et al., 2020; Rahmat et

al., 2021; Utama et al., 2020; Adri et al., 2020; Yuliarta & Rahmat, 2021; Rahmat & Kurniadi, 2020; Rahmat et al., 2020; Rahmat et al., 2020). Proses partisipatif juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas pembangunan. Dalam konteks SDGs, peran masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan secara kolektif.

Sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs melalui investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi (Rahmat, 2019; Banjarnahor et al., 2020; Rahmat et al., 2020; Gustaman et al., 2020; Rahmat et al., 2022; Kodar et al., 2020; Najib & Rahmat, 2021; Rahmat et al., 2020; Widyaningrum et al., 2020; Yurika et al., 2022; Muara et al., 2021; Aminullah et al., 2021; Wulandara & Rahmat, 2024; Ardinata et al., 2023; Pamungkas & Rahmat, 2023; Rahmat et al., 2020; Febrina & Rahmat, 2024; Rahmat, 2023). Dalam konteks pembangunan daerah, keterlibatan sektor swasta dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung layanan dasar seperti energi bersih dan pengelolaan limbah. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mengatasi keterbatasan anggaran publik dan menciptakan solusi berbasis pasar untuk tantangan pembangunan. Dengan insentif yang tepat dan kebijakan yang kondusif, sektor swasta dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis model kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam rencana pembangunan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses interaksi, dinamika kerja sama, serta tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada SDGs. Pendekatan ini juga relevan dalam mengkaji konteks lokal dan realitas sosial yang kompleks.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, perwakilan sektor swasta, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lokasi untuk melihat proses kolaborasi dan implementasi program berbasis SDGs. Dokumentasi seperti laporan kebijakan, dokumen perencanaan, dan arsip kegiatan juga dikaji untuk mendukung data primer. Teknik ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana kolaborasi tersebut dibangun dan dijalankan dalam konteks pembangunan daerah (Ma'dika & Rahmat, 2024; Saputra & Rahmat, 2024; Nurmalasari et al., 2022; Pratama et al., 2024; Rahmat, 2024; Rahmat & Pernanda, 2021; Rahmat et al., 2021; Rahmat et al., 2022; Akbar et al., 2024; Rahmat et al., 2023, Baarik et al., 2023; Rahmat et al., 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Data dari wawancara dan observasi dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait bentuk kolaborasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan antar tema, serta faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi. Selain data lapangan, analisis juga

melibatkan kajian literatur dan dokumen kebijakan guna memperkuat hasil temuan dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap objek studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Mencapai Tujuan Pembangunan (SDGs) yang Ditetapkan Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengintegrasikan tujuan tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk mewujudkan hal ini adalah melalui model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Model kolaboratif ini mengedepankan kerja sama antara berbagai aktor dalam rangka merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs. Kolaborasi semacam ini tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga pada alokasi sumber daya yang optimal, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi serta informasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi (Nurhadiyanta et al., 2023; Rahmat et al., 2023; Rahmat et al., 2018; Rahmat et al., 2024; Hasrian et al., 2023; Akbar et al., 2024; Rahmat, 2024; Piliang et al., 2024; Wahyuni et al., 2024; Priantoro et al., 2024; Hasrian & Rahmat, 2024, Syazali et al., 2023; Rahmat et al., 2024; Ma'ruf & Rahmat, 2024; Rahmat et al., 2024; Meidiyustiani & Rahmat, 2024; Ma'ruf & Rahmat, 2024; Aprilyanto et al., 2023).

Pada dasarnya, model kolaboratif yang baik memerlukan adanya keseimbangan antara partisipasi aktif semua pihak, transparansi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengatur perundang-undangan memiliki peran utama dalam menetapkan visi dan kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan SDGs. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar dan menciptakan iklim yang mendukung kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat (Bevir, 2022). Masyarakat, sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan pembangunan, memiliki peran memberikan masukan terkait dengan kebutuhan dan prioritas mereka. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti forum diskusi, musyawarah perencanaan pembangunan, dan konsultasi publik (Amsler, 2019).

Sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam model kolaboratif ini melalui pemanfaatan sumber daya dan keahlian yang mereka miliki. Perusahaan-perusahaan ini, selain sebagai penggerak perekonomian, juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat berupa investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan, dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, serta adopsi teknologi yang efisien (Alfaro Navarro & Nevado Peña, 2023).

Salah satu aspek yang krusial dalam implementasi model kolaboratif ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi ini dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Misalnya, aplikasi berbasis web atau platform digital dapat digunakan untuk memantau kemajuan proyek pembangunan, mengumpulkan data, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan (Dunleavy et al., 2021). Penggunaan TIK juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik serta mengurangi potensi korupsi, yang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Namun, untuk menciptakan model kolaboratif yang efektif, perlu adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang setara dan saling mendukung. mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul, seperti perbedaan kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk itu, proses negosiasi dan kompromi menjadi

bagian integral dari model ini. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang berbasis pada SDGs harus melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga hasil akhirnya dapat mencerminkan aspirasi bersama yang menguntungkan semua pihak (Barnes et al., 2018).

Selain itu, evaluasi yang terus-menerus terhadap implementasi kebijakan pembangunan juga. Dengan adanya evaluasi yang rutin, dapat diketahui sejauh mana model kolaboratif ini berhasil dalam mengintegrasikan SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Evaluasi ini juga memungkinkan adanya perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses implementasi. Dalam hal ini, penggunaan indikator yang sesuai dengan SDGs akan membantu dalam mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai (Aurigi, 2025).

Di sisi lain, model kolaboratif ini memerlukan adanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah harus mampu merancang regulasi yang memberikan insentif kepada sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas (Cohen, 2025). Hal ini agar proses kolaborasi berjalan dengan adil dan memberikan hasil yang bagi seluruh masyarakat.

Melalui pendekatan ini, diharapkan integrasi SDGs dalam rencana pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdampak positif terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal. Model kolaboratif ini juga berpotensi untuk memperkuat hubungan antara sektor publik dan sektor swasta, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan untuk mencapai pembangunan yang inklusif (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2017).

Dalam jangka panjang, implementasi model kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan dalam pembangunan daerah, di mana peran serta ketiga aktor utama—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—dapat saling mendukung dan melengkapi. Model ini juga akan memfasilitasi pencapaian SDGs yang tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan (Alfaro Navarro et al., 2023). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya keberhasilan jangka pendek, tetapi juga untuk mewujudkan visi pembangunan yang di masa depan. Semua pihak harus bekerja sama dengan semangat gotong royong dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yakni pembangunan yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan (Bevir, 2022).

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Oleh Masing-Masing Pihak dalam Membangun Kolaborasi untuk Mengintegrasikan SDGs dalam Rencana Pembangunan Daerah

Implementasi Tujuan Pembangunan (SDGs) dalam perencanaan pembangunan daerah melalui model kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Masing-masing pihak—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—menghadapi rintangan yang berbeda dalam upaya berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan, tetapi juga dengan masalah struktural, kebijakan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Mengenai tantangan yang dihadapi oleh setiap aktor dapat membantu merumuskan solusi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan SDGs secara kolaboratif.

Tantangan bagi Pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kendali atas kebijakan publik dan sumber daya yang besar, memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Namun, pemerintah dihadapkan pada tantangan terkait dengan kelembagaan dan birokrasi yang kompleks. Proses pengambilan

keputusan yang lambat, tumpang tindihnya kebijakan antar lembaga, serta kekurangan koordinasi antar berbagai level pemerintahan menghambat percepatan implementasi SDGs. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2022), salah satu tantangan utama dalam kolaborasi antara pemerintah dan sektor lainnya adalah kebutuhan akan perubahan dalam struktur organisasi untuk mendukung kerja sama yang lebih efisien. Struktur pemerintahan yang rigid menyulitkan inisiatif yang melibatkan banyak pihak.

Selain itu, pemerintah menghadapi kendala dalam alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Meskipun SDGs mencakup banyak aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan, terbatasnya anggaran publik membuat pemerintah terpaksa memilih prioritas yang lebih mendesak, yang tidak selalu sejalan dengan pencapaian semua tujuan SDGs. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi isu utama yang menghambat keberhasilan kolaborasi (Firman et al., 2022). Korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga dapat menghambat implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mencapainya, karena pemerintah yang tidak transparan cenderung tidak dapat membangun kepercayaan publik yang diperlukan untuk suksesnya kolaborasi.

Tantangan bagi Masyarakat. Masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan pembangunan juga menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam proses kolaboratif ini. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan atau ketidaktertarikan sebagian besar masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Kurangnya dan pengetahuan mengenai SDGs menjadi kendala besar. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bagaimana SDGs dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak merasa termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan (Giffinger et al., 2024).

Selain itu, partisipasi masyarakat terbatas oleh kurangnya akses terhadap informasi yang transparan mengenai kebijakan pembangunan yang direncanakan. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses mudah ke teknologi informasi mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi mereka atau berpartisipasi dalam forum-forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki suara atau kekuatan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Tajuddin, 2019). Kurangnya akses ini dapat mengurangi kualitas kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, tantangan budaya juga memainkan peran proses kolaborasi. Di beberapa wilayah, ketergantungan pada otoritas tradisional atau struktur sosial yang sudah ada dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan yang lebih modern dan inklusif. Menurut Firman, Rahmawati, dan Trijayanto (2023), penerimaan masyarakat terhadap teknologi e-government dan platform digital untuk partisipasi publik masih terbatas, terutama di kalangan kelompok masyarakat yang lebih tua atau kurang terdidik.

Tantangan bagi Sektor Swasta. Sektor swasta, yang memiliki sumber daya finansial dan keahlian teknis, juga menghadapi tantangan dalam berkolaborasi untuk mendukung pencapaian SDGs. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor swasta adalah konflik antara tujuan ekonomi jangka pendek dan tujuan pembangunan jangka panjang. Banyak perusahaan yang terfokus pada profitabilitas dan bisnis mereka dalam jangka pendek, yang tidak sejalan dengan tujuan SDGs yang lebih luas, seperti pengurangan emisi karbon atau pengentasan kemiskinan (Engagement, 2022). Perusahaan-perusahaan besar, terutama yang beroperasi di sektor industri, menganggap bahwa kontribusi mereka terhadap pencapaian SDGs tidak langsung menguntungkan dalam jangka waktu pendek. Mereka mungkin merasa bahwa berinvestasi dalam atau program sosial membutuhkan pengeluaran yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam program-program yang mendukung SDGs.

Hal ini menciptakan tantangan dalam mengintegrasikan sektor swasta secara efektif ke dalam kolaborasi pembangunan (Rahmawati & Firman, 2021).

Selain itu, sektor swasta terhambat oleh kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau bahkan kontradiktif dengan tujuan pembangunan. Misalnya, insentif fiskal atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor-sektor tertentu mungkin tidak mengarah pada pencapaian SDGs. Oleh karena itu, sektor swasta merasa kurang didorong untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jika kebijakan yang ada tidak memadai atau kurang jelas arahnya (Emerson et al., 2022). Keterbatasan dalam kerangka kebijakan yang mendorong dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga menjadi hambatan besar dalam membangun kolaborasi yang efektif.

Hambatan Bersama: Koordinasi dan Komunikasi. Selain tantangan yang dihadapi masing-masing pihak, salah satu hambatan utama dalam membangun kolaborasi yang sukses adalah masalah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam banyak kasus, terdapat ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan implementasi di lapangan yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Ketidakjelasan dalam tujuan dan peran masing-masing aktor mengarah pada kebingungannya arah pembangunan yang seharusnya ditempuh (Marshall et al., 2024).

Koordinasi yang buruk antara pihak-pihak ini dapat mengakibatkan duplikasi usaha atau bahkan kebijakan yang saling bertentangan. Misalnya, proyek pembangunan yang dirancang oleh pemerintah mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal, atau sektor swasta mungkin tidak mendapatkan insentif yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan (Giffinger et al., 2024). Oleh karena itu, membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama yang berkaitan dengan SDGs.

Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan SDGs di Tingkat Daerah

Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai Tujuan Pembangunan (SDGs) di tingkat daerah bergantung pada sejumlah faktor yang saling mendukung. Kolaborasi yang efektif antara ketiga aktor tersebut memerlukan sinergi yang baik, transparansi, kepercayaan, dan komitmen yang kuat dari setiap pihak. Di sisi lain, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, serta kesadaran sosial juga berperan memfasilitasi kolaborasi ini. Faktor-faktor ini akan dibahas lebih lanjut untuk mengapa kolaborasi antara ketiga pihak ini dalam mencapai SDGs di tingkat daerah.

Komitmen dan Kepemimpinan yang Kuat. Komitmen yang jelas dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan kolaborasi. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, kolaborasi akan cenderung berjalan stagnan atau bahkan gagal. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran krusial dalam mengarahkan dan memfasilitasi kolaborasi antar pihak, dengan memastikan bahwa tujuan SDGs dijadikan prioritas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah (Emerson et al., 2022). Selain itu, pemerintah juga perlu menunjukkan kepemimpinan yang efektif untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang mungkin timbul antara sektor publik dan swasta.

Di sisi lain, sektor swasta juga harus menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga untuk mendukung tujuan pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi (Rahmawati & Firman, 2021). Kepemimpinan sektor swasta yang berorientasi pada dapat mendorong implementasi kebijakan yang mendukung SDGs. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut, dengan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Keterlibatan dan Partisipasi Aktif Masyarakat. Keberhasilan kolaborasi bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan agar hasil pembangunan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara langsung dan relevan (Firman et al., 2022). Partisipasi masyarakat ini tidak hanya terbatas pada proses pemilihan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan meningkatkan partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga, menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, serta memperkuat legitimasi kebijakan yang diterapkan. Selain itu, masyarakat yang memiliki yang baik mengenai SDGs dan manfaatnya bagi kesejahteraan mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program (Giffinger et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi yang efektif tentang SDGs menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah dan sektor swasta harus berperan dalam menyebarkan informasi yang relevan dan membangun kesadaran mengenai pencapaian SDGs di tingkat daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas. Faktor lainnya adalah transparansi dalam proses kolaborasi. Setiap pihak harus memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Ketika informasi mengenai pengelolaan sumber daya dan dana pembangunan terbuka dan mudah diakses, kepercayaan antar pihak akan meningkat, dan kolaborasi akan menjadi lebih efektif (Emerson et al., 2022). Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program SDGs dapat dipantau oleh masyarakat dan sektor swasta. Hal ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya yang dapat merusak program tersebut. Transparansi juga mencakup komunikasi yang jelas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tentang tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan dari kolaborasi tersebut. Dalam hal ini, sistem pelaporan yang akuntabel dan mekanisme evaluasi yang transparan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas hasil yang dicapai.

Sinergi antara Kebijakan Pemerintah dan Sektor Swasta. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta juga menjadi faktor yang dalam mendukung kolaborasi untuk mencapai SDGs. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi sektor swasta dalam pembangunan, baik melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, ataupun kebijakan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2017). Sektor swasta memiliki peran yang besar dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam hal investasi, teknologi, dan inovasi. Oleh karena itu, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas implementasi program-program, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, sinergi ini juga harus dilandasi dengan kejelasan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa sektor swasta tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan SDGs.

Infrastruktur Teknologi dan Data. Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran yang dalam mendukung kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penggunaan teknologi memungkinkan terciptanya sistem informasi yang lebih efisien dalam mengelola data terkait SDGs, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (Firman et al., 2022). Sistem e-government yang terintegrasi dengan baik akan memudahkan akses informasi oleh masyarakat, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pembangunan. Selain itu, pemanfaatan big data dan analitik juga bermanfaat untuk memantau kemajuan pencapaian SDGs dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Data yang akurat dan real-time memungkinkan pemerintah dan sektor swasta untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan situasi di lapangan, serta

memberikan wawasan yang lebih baik dalam merencanakan program di masa depan (Dunleavy et al., 2021).

Pendidikan dan Kesadaran Publik. Pendidikan dan peningkatan kesadaran publik merupakan faktor yang mendukung keberhasilan kolaborasi. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang mengedukasi masyarakat mengenai SDGs dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk mencapainya. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini, dengan mengintegrasikan nilai-nilai ke dalam kurikulum pendidikan formal, serta melalui kampanye kesadaran publik yang efektif. Di tingkat daerah, pemerintah dan sektor swasta untuk membangun kesadaran mengenai bagaimana dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan yang lebih baik tentang SDGs, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan sektor swasta (Tajuddin, 2019).

Keterbukaan terhadap Inovasi dan Pendekatan Baru. Keberhasilan kolaborasi juga bergantung pada sejauh mana setiap pihak terbuka terhadap inovasi dan pendekatan baru dalam mencapai tujuan SDGs. Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, memiliki peran menciptakan solusi inovatif yang dapat membantu memecahkan masalah pembangunan. Pemerintah harus membuka ruang bagi inovasi, baik dalam hal kebijakan maupun dalam penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi (Aurigi, 2025). Pendekatan baru yang berbasis pada kolaborasi lintas sektor, penggunaan teknologi canggih, serta model bisnis yang dapat mempercepat pencapaian SDGs di tingkat daerah.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai SDGs di tingkat daerah kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Komitmen yang kuat, kepemimpinan yang efektif, transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta adalah kunci utama untuk menciptakan kolaborasi yang sukses. Infrastruktur teknologi yang memadai, pendidikan, serta keterbukaan terhadap inovasi juga memainkan peran mempercepat pencapaian tujuan SDGs.

SIMPULAN

Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan SDGs di tingkat daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mendukung. Pertama, komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari ketiga pihak menjadi dasar utama untuk tercapainya sinergi yang efektif dalam kolaborasi. Tanpa adanya kepemimpinan yang jelas dan komitmen yang tinggi, upaya pencapaian SDGs dapat terhambat. Kedua, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Masyarakat yang teredukasi dan memiliki tentang SDGs akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan juga menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan antar pihak. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta, yang dilandasi dengan komitmen, mempengaruhi keberhasilan kolaborasi ini. Infrastruktur teknologi yang kuat juga berperan mendukung komunikasi yang efisien, serta pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai SDGs di tingkat daerah. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kepemimpinan dan komitmen terhadap dengan menciptakan kebijakan yang jelas dan mendukung sektor swasta dalam berkontribusi pada SDGs. Kedua, program pendidikan dan sosialisasi tentang SDGs harus lebih diperluas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga, pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menciptakan sistem transparansi yang terbuka agar semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Selain itu, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mempercepat proses kolaborasi dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Terakhir, untuk mencapai jangka

panjang, pemerintah perlu menciptakan ruang untuk inovasi, baik dalam hal kebijakan, teknologi, maupun pendekatan baru dalam pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Wajah Buram Pelayanan Publik." (n.d.). <https://mediaindonesia.com/opini/468871/wajah-buram-pelayanan-publik>.
- [2] Adri, K., Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Najib, A., & Priambodo, A. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 361-374.
- [3] Akbar, A. A., Darmawan, Y., Wibowo, A., & Rahmat, H. K. (2024). Accuracy Assessment of Monthly Rainfall Predictions using Seasonal ARIMA and Long Short-Term Memory (LSTM). *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, 5(2), 100-115.
- [4] Akbar, A. A., Dwiningtias, H., & Rahmat, H. K. (2024). Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*, 1(1), 15-20.
- [5] Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukenali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan dan konseling. *JURNAL MIMBAR: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84-101.
- [6] Aminullah, A. A., Priambodo, A., Rahmat, H. K., & Adri, K. (2021). Kesiapan kantor pencarian dan pertolongan balikpapan dalam penanggulangan bencana guna menyambut pemindahan ibukota baru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 51-59.
- [7] Ansell, C., & Gash, A. (2022). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [8] Aprilyanto, A., Widana, I. D. K. K., Subiyanto, A., & Rahmat, H. K. (2023). Pemulihan Pascabencana Tsunami 2018 Guna Mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang. *Jagratar: Journal of Disaster Research*, 1(1), 25-32.
- [9] Ardinata, R. P., Rahmat, H. K., Andres, F. S., & Waryono, W. (2022). Kepemimpinan transformasional sebagai solusi pengembangan konsep smart city menuju era society 5.0: sebuah kajian literatur [Transformational leadership as a solution for the development of the smart city concept in the society era: a literature review]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1).
- [10] Ardinata, R. P., Susanti, R., & Rahmat, H. K. (2023). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan di Kawasan Wisata Chinangkiak Dreampark Solok Sumatera Barat. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(1), 1-9.
- [11] Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Vol. 3.
- [12] Baarik, M. H. A., Sianipar, I., Kusumadjati, A., Alfarasyi, A. R., Rahmat, H. K., & Rahmi, T. N. (2023). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Software Microsoft Nearpod sebagai Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Empowerment*, 1(1), 15-20.
- [13] Banjarnahor, J., Rahmat, H. K., & Sakti, S. K. (2020). Implementasi sinergitas lembaga pemerintah untuk mendukung budaya sadar bencana di Kota Balikpapan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 448-461.
- [14] Bastian, O. A., Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Rajab, D. D. A., & Nurjannah, N. (2021). Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millenial di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 126-133.

- [15] Elsi, Sutri Destemi, et.al. (2020). *Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 11 No 2.
- [16] Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2022). *An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- [17] Engagement, E. (2022). *Lawrence Technological University College of Management: An Exploratory Case Study on the Influence of Sustainability on*.
- [18] Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2020). *Dualisme Hukum Empiris & Penelitian Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- [19] Febrian, Ranggı Ade. (2016). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Wedana Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi II*.
- [20] Febrina, I., & Rahmat, H. K. (2024). Motivasi kerja sumber daya manusia dalam organisasi: Sebuah tinjauan pustaka. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 1(1), 29-34.
- [21] Firman, F., Sumatono, S., Muluk, M. K., & Setyowati, E. (2022). *Smart Governance : A Study of the Jakarta Smart City During the Covid-19 Pandemic. KnE Social Sciences*, 491–502. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10573>
- [22] Firman, Rahmawati, R., & Trijayanto, D. (2023). *Penerimaan dalam E-Government (Studi Fenomenologi pada Pengguna Layanan Terpadu Satu Pintu di BPTSP DKI Jakarta). Promedia*, III(2), 274–302.
- [23] Giffinger, R., et.al. (2024). *Smart cities: ranking of European mid-sized cities. Vienna University of Technology*, October, 28. [https://doi.org/10.1016/S0264-2751\(98\)00050-X](https://doi.org/10.1016/S0264-2751(98)00050-X).
- [24] Gustaman, F. A. I., Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., & Maarif, S. (2020). Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 462-469.
- [25] Hakim, F. A., Banjarnahor, J., Purwanto, R. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pengelolaan obyek pariwisata menghadapi potensi bencana di Balikpapan sebagai penyangga ibukota negara baru. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 607-612.
- [26] Hasrian, H. H. H., & Rahmat, H. K. (2024). Gambaran Tingkat Perilaku Altruistik pada Siswa Kelas XI: Studi pada Sebuah Madrasah Aliyah Negeri. *Contiguity: Jurnal Psikologi*, 20(2), 1-9.
- [27] Hasrian, H., Rifaldi, M., Fiorella, A., Febianto, Y., Chetwynd, A. P., & Rahmat, H. K. (2023). Edukasi Urgensi Ilmu Pembukuan dalam Bisnis bagi Calon Wirausahawan Muda di MAN Lumajang. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI*, 1(2), 67-72.
- [28] Kodar, M. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 437-447.
- [29] Kurniadi. (2021). *Governance Penyediaan Infrastruktur Dalam Collaborative*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [30] Ma'dika, Z. P., & Rahmat, H. K. (2024). Peran Manajemen Karir dalam Proses Peningkatan Kinerja Karyawan dalam Suatu Perusahaan. *Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies*, 1(1), 1-8.
- [31] Marshall, B. K., Picou, J. S., & Schlichtmann, J. R. (2024). *Technological disasters, litigation stress, and the use of alternative dispute resolution mechanisms. Law and Policy*. <https://doi.org/10.1111/j.0265-8240.2004.00013.x>.
- [32] Ma'ruf, A. M. M., & Rahmat, H. K. (2023). Pancasila dalam Konteks Kenegaraan Republik Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual. *Trends in Applied Sciences, Social Science, and Education*, 1(2), 59-68.
- [33] Ma'ruf, A. M. M., & Rahmat, H. K. (2024). Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Masih Relevankah?. *Civil and Military Cooperation Journal*, 1(2), 73-76.

- [34] Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191-201.
- [35] Maryam, Neneng Siti. (2016). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. *Jurnal: Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1).
- [36] Meidiyustiani, R., & Rahmat, H. K. (2024). Recent Trends in Publication of Research on Financial Literacy in Students Using VOSViewer: A Bibliometric Analysis. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(4), 88-95.
- [37] Muara, T., Prasetyo, T. B., & Rahmat, H. K. (2021). Psikologi Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemi: Sebuah Studi Analisis Kondisi Psikologis Menghadapi COVID-19 Perspektif Comfort Zone Theory. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 69-77.
- [38] Muara, T., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas Diplomasi dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 161-170.
- [39] Mubarokah, Laily. (2023). *Wawancara*. 22 Februari 2023.
- [40] Najib, A., & Rahmat, H. K. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(1), 14-23.
- [41] Nurhadiyanta, N., Fendiyanto, M. H., Rahmat, H. K., Advisa, D. A., & Meireni, M. (2023). Penyuluhan Penurunan Kasus Stunting untuk Meningkatkan Kualitas Generasi Muda di Desa Hambalang. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI*, 1(2), 43-48.
- [42] Nurmalasari, E., Rahmat, H. K., & Farozin, M. (2022, April). Motivasi santri tuli dalam mengikuti kegiatan madrasah diniyyah daring di Madrasah Salafiyah III Pondok Pensantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. In *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education* (Vol. 2, pp. 103-117).
- [43] Pamungkas, H. Y., & Rahmat, H. K. (2023). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TANAH PASCA GEMPA LOMBOK 2018 MELALUI PENDEKATAN PERSUASIF BERBASIS HAK ASASI MANUSIA [THE EFFORTS TO SETTLEMENT OF STATE-OWNED PROPERTY IN THE FORM OF LAND ASSETS POST THE 2018 LOMBOK EARTHQUAKE THROUGH A PERSUASIVE-BASED HUMAN RIGHTS APPROACH]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 2(1), 1-10.
- [44] Piliang, M. Z., Alfarysy, A. R., Meireni, M., Rahmat, H. K., & Sianipar, I. (2023). Leadership Training Guna Membangun Jiwa Kepemimpinan bagi Guru di Sekolah Dasar Islam. *Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Empowerment*, 1(1), 21-26.
- [45] Pratama, J. P., Dewo, L. P., & Rahmat, H. K. (2024). Model Sinergitas Pentahelix dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*, 1(1), 1-6.
- [46] Pratikno, H., Rahmat, H. K., & Sumantri, S. H. (2020). Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 427-436.
- [47] Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *Perspektif*, 9(2), 307-313.
- [48] Priantoro, A. U., Rahmat, H. K., Prihantoro, A., Dragon, B., & Wahyuningtyas, A. (2024). Peningkatan Pemahaman Ancaman Bencana di Kabupaten Subang pada Saka SAR Kabupaten Subang Melalui Edukasi Mitigasi Bencana. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI*, 2(1), 1-6.
- [49] Purnomo, Edy, et.al. (2021). *Menetas Tumbuh dan Berkembang di Jambaran Tiung Biru*. Bojonegoro: Idfos Indonesia.

- [50] Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi pendidikan bela negara guna membangun sikap nasionalisme pada generasi millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 257-271.
- [51] Rahmanisa, R., Rahmat, H. K., Cahaya, I., Annisa, O., & Pratiwi, S. (2021). Strategi Mengembangkan Resiliensi Individu di Tengah Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Islamic Art Therapy [Strategy to Develop Individual Resilience in The Middle of The COVID-19 Pandemic using Islamic Art Therapy]. *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 1(1), 39-52.
- [52] Rahmat, H. K. (2019). Implementasi strategi layanan bimbingan dan konseling komprehensif bagi siswa tunanetra di MTs Yaketunis Yogyakarta. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 16(1), 37-46.
- [53] Rahmat, H. K. (2019). Mobile learning berbasis appypie sebagai inovasi media pendidikan untuk digital natives dalam perspektif islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1).
- [54] Rahmat, H. K. (2023). Penggunaan Layanan Bimbingan Klasikal Guna Meningkatkan Literasi Kebencanaan Bagi Siswa [Using Classical Guidance Services To Improve Disaster Literacy For Students]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 2(2), 83-92.
- [55] Rahmat, H. K. (2024). Development of Nationalism Attitude in The Millennial Generation Through National Defense Education. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 1(1), 1-8.
- [56] Rahmat, H. K. (2024). PSIKOLOGI BENCANA: SEBUAH KAJIAN DALAM MEMITIGASI DAMPAK PSIKOLOGIS PASCA BENCANA BAGI MASYARAKAT URBAN. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 7(2), 599-610.
- [57] Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling traumatik: Sebuah strategi guna mereduksi dampak psikologis korban bencana alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- [58] Rahmat, H. K., & Budiarto, A. (2021). Mereduksi dampak psikologis korban bencana alam menggunakan metode biblioterapi sebagai sebuah penanganan trauma healing [Reducing the psychological impact of natural disaster victims using bibliotherapy method as a trauma healing handler]. *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 1(1), 25-38.
- [59] Rahmat, H. K., & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan interkoneksi antara pendidikan kebencanaan dan nilai-nilai Qur'ani dalam upaya pengurangan risiko bencana di sekolah menengah pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 2, 455-461.
- [60] Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2021). The Importance of Disaster Risk Reduction Through The Participation of Person with Disabilities in Indonesia. *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 137-148.
- [61] Rahmat, H. K., Achadi, A. H., Akbar, A. A., Basri, A. S. H., & Yurika, R. E. (2024). Pembelajaran Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal: Sebuah Inovasi dalam Membangun Resiliensi Sekolah. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3, 444-453.
- [62] Rahmat, H. K., Banjarhanor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91-107.
- [63] Rahmat, H. K., Fajrian, A., & Ma'rufah, N. (2022, September). Preventing Genetic Diseases Through Genetic Counseling to Build a Harmonious Family: a Narrative Review. In *International Conference on Islamic Guidance and Counseling* (Vol. 2, pp. 110-119).
- [64] Rahmat, H. K., Frinaldi, A., Rembrandt, R., & Lanin, D. (2024). MODEL KESIAPSIAGAAN BENCANA BERBASIS SEKOLAH MELALUI PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DI KOTA TANGERANG. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 7(3), 655-668.
- [65] Rahmat, H. K., Hasrian, H., & Bimantara, M. A. (2023). Membangun Kesiapsiagaan Bencana pada Siswa Melalui BLU-DISCARE sebagai Inovasi Pendidikan Kebencanaan di Sekolah Guna Mewujudkan Generasi Tangguh Bencana. *Jagratar: Journal of Disaster Research*, 1(2), 49-58.

- [66] Rahmat, H. K., Hiram, T. P. B. P. S., Alamsyah, A. N., & Bimantara, M. A. (2024). Upaya Peningkatan Budaya Sadar Bencana Pada Siswa Guna Meningkatkan Kesiapsiagaan SMA Terpadu Baitul Hikmah Depok. *Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Empowerment*, 2(1), 1-10.
- [67] Rahmat, H. K., Madjid, M. A., & Pernanda, S. (2020). Kolektivitas sebagai sistem nilai Pancasila dalam perkembangan lingkungan strategis di Indonesia: suatu studi reflektif. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 7(2), 83-95.
- [68] Rahmat, H. K., Muzaki, A., & Pernanda, S. (2021, March). Bibliotherapy as an alternative to reduce student anxiety during COVID-19 pandemic: A narrative review. In *Proceeding international conference on science and engineering* (Vol. 4, pp. 379-382).
- [69] Rahmat, H. K., Nurmalasari, E., & Falah, N. (2018). Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Terinternalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Underachiever. In *Prosiding Seminar Nasional Konvensi BK ke-XX & Kongres ABKIN ke-XIII*.
- [70] Rahmat, H. K., Pernanda, S., Casmini, C., Budiarto, A., Pratiwi, S., & Anwar, M. K. (2021). Urgensi Altruisme dan Hardiness pada Relawan Penanggulangan Bencana Alam: Sebuah Studi Kepustakaan [The Urgency of Altruism and Resilience in Natural Disaster Management Volunteers: A Literature Study]. *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications*, 1(1), 45-58.
- [71] Rahmat, H. K., Pernanda, S., Hasanah, M., Muzaki, A., Nurmalasari, E., & Rusdi, L. (2021). Model pembelajaran discovery learning guna membentuk sikap peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar: sebuah kerangka konseptual. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 109-117.
- [72] Rahmat, H. K., Pratikno, H., Gustaman, F. A. I., & Dirhamsyah, D. (2020). Persepsi Risiko dan Kesiapsiagaan Rumah Tangga dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 25-31.
- [73] Rahmat, H. K., Rahman, F. A., Raharjo, D. H., Hasrian, H., & Akbar, A. A. (2023). Peningkatan Literasi Kebencanaan pada Masa Tanggap Darurat Bencana pada Mahasiswa Manajemen Bencana Melalui Kunjungan Ilmiah ke Human Initiative Headquarter Depok. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI*, 1(2), 61-66.
- [74] Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Ma'rufah, N., Gustaman, F. A. I., Sumantri, S. H., & Adriyanto, A. (2020). Bantuan China Berupa Alat Uji Cepat COVID-19 kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 19-27.
- [75] Rahmat, H. K., Salsabila, N. R., Nurliawati, E., Yurika, R. E., Mandalia, S., Pernanda, S., & Arif, F. (2022, June). Bibliokonseling Berbasis Nilai-Nilai Sumbang Duo Baleh dalam Membangun Karakter Positif bagi Remaja di Minangkabau. In *National Conference on Educational Science and Counselling* (Vol. 2, No. 1).
- [76] Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., ... & Fadil, A. M. (2020). Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah tinjauan kepustakaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2).
- [77] Rahmat, H. K., Syah, R., & Putra, A. R. (2024). Bantuan Kemanusiaan sebagai Alat Diplomasi Bencana: Sebuah Ulasan di Tengah Menghadapi Krisis Global. *Civil and Military Cooperation Journal*, 1(1), 33-42.
- [78] Rahmawati, R., & Firman, F. (2021). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*. <https://doi.org/10.24269/aristo.v/1.2017.10>
- [79] Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, Terttiaavini. (2022). *Good Mengukur Kinerja Lembaga (Review)*. *Jurnal: Pemerintahan dan Politik*, Vol. 7 No.1.

- [80] Saputra, I., & Rahmat, H. K. (2024). Evaluasi Kinerja Karyawan dalam Suatu Perusahaan: Sebuah Kajian Kepustakaan. *Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies*, 1(1), 19-24.
- [81] Sedarmayanti. (2022). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- [82] Sedarmayati. (2024). *Bagian kedua membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- [83] Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [84] Solikhudin, Muhammad. (2022). *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media. <https://books.google.co.id/books?id=mOmSEAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- [85] Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.
- [86] Syazali, M., Rahmat, H. K., Widana, I. D. K. K., Supena, E. D. J., Basuki, R., Fendiyanto, M. H., ... & Awwanah, M. (2023). Workshop Manajemen dan Substansi Pengelolaan Jurnal Ilmiah Menuju Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional. *Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Empowerment*, 1(1), 27-34.
- [87] Tajuddin, M. (2019). *Model Blue Print Smart City Pemerintah Daerah Berbasis Four Stage Method (FSM) yang Sustainable*. *J. Sist. Inf. Bisnis*, 9(1), 63-70.
- [88] Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598-606.
- [89] Wahyuni, E. S., Suparmoko, Y. H., & Rahmat, H. K. (2024). Peningkatan Softskill Penulisan Tugas Akhir pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Melalui Pelatihan Penggunaan Mendeley. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI*, 2(1), 13-18.
- [90] Widyaningrum, N., Rahmat, H. K., & Maarif, S. (2020). Langkah Taktis Gaya Kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 6(2).
- [91] Wulandari, F., & Rahmat, H. K. (2024). Tingkat Resiliensi Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri Lumajang Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021. *Contiguity: Jurnal Psikologi*, 20(2), 10-19.
- [92] Wulandari, Widuri, Suranto, & Eko Priyo Purnomo. (2019). "Collaborative Government Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 4(1), 13-28. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28>.
- [93] Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180-189.
- [94] Yurika, R. E., Rahmat, H. K., & Widyastuti, C. (2022, June). Integrasi Layanan Bimbingan dan Konseling dengan Kurikulum Berbasis Budaya Yogyakarta untuk Membangun Cultural Awareness. In *National Conference on Educational Science and Counselling* (Vol. 2, No. 1).
- [95] Zakiyah, A., Rahmat, H. K., & Sa'adah, N. (2022). Peran konselor lintas agama dan budaya sebagai problem solving masyarakat multibudaya [The role of cross-religious and cultural counselors as a multi-cultural community solving problem]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1), 45-60.